



Sekretariat Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

# BIRO HUKUM

**Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)**  
Tahun Anggaran 2023



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

**RKA SKPD**

**Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.02 - BIRO HUKUM**

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.785.707.000</b>
5.1	BELANJA OPERASI	3.785.707.000
5.1.1	Belanja Pegawai	2.040.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.783.667.000

Semarang, 17 November 2022

**KEPALA BIRO HUKUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

(IWANUDDIN ISKANDAR, SH. M.Hum)  
197112071995031003



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

**RKA  
BELANJA SKPD**

**Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.02 - BIRO HUKUM**

**Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
Uru san	Sub uru san	Prog ram	Kegi atan	Sub kegi atan					T					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		2.796.707.000	3.785.707.000	0	0	0	3.785.707.000	0
	4.01				SEKRETARIAT DAERAH	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		2.796.707.000	3.785.707.000	0	0	0	3.785.707.000	0
		01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		481.707.000	601.707.000	0	0	0	601.707.000	0
			1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		300.000.000	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0
				10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		300.000.000	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0
			1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		181.707.000	251.707.000	0	0	0	251.707.000	0
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		150.000.000	220.000.000	0	0	0	220.000.000	0
				10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		31.707.000	31.707.000	0	0	0	31.707.000	0
		05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		2.315.000.000	3.184.000.000	0	0	0	3.184.000.000	0
			1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1.400.000.000	1.894.000.000	0	0	0	1.894.000.000	0
				01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		400.000.000	602.000.000	0	0	0	602.000.000	0
				02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		100.000.000	110.000.000	0	0	0	110.000.000	0
				03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		275.000.000	437.000.000	0	0	0	437.000.000	0
				04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		625.000.000	745.000.000	0	0	0	745.000.000	0
			1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		915.000.000	1.290.000.000	0	0	0	1.290.000.000	0
				01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		665.000.000	965.000.000	0	0	0	965.000.000	0
				02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		250.000.000	325.000.000	0	0	0	325.000.000	0
					Jumlah			2.796.707.000	3.785.707.000	0	0	0	3.785.707.000	0


Semarang, 17 November 2022

**KEPALA BIRO HUKUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

(IWANUDDIN ISKANDAR, SH. M.Hum)

NIP. 197112071995031003



	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				RKA-RINCIAN BELANJA SKPD	
	Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023					
Urusan Pemerintahan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.01 - PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					
Sasaran Program (outcome)	: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah					
Capaian Program (impact)	: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah					
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01 - Sekretariat Daerah					
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.02 - BIRO HUKUM					
Alokasi Tahun T-1	: Rp181.707.000					
Alokasi Tahun T	: Rp251.707.000					
Alokasi Tahun T+1	:					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum				100%	
Masukan	Tersedia Dana				Rp251.707.000	
Keluaran	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum				2Dokumen	
Hasil	Nilai IKM Biro Hukum				78.5000 Angka	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: Pajak Rokok-Penegakan Disiplin					
Lokasi	: BIRO HUKUM JAWA TENGAH					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Hukum 12 Bulan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023			Sampai 31 Desember 2023		
Keterangan	: -					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			31.707.000		31.707.000
5.1	BELANJA OPERASI			31.707.000		31.707.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			31.707.000		31.707.000
5.1.2.1	Belanja Barang			31.707.000		31.707.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			31.707.000		31.707.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			19.667.000		19.667.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			11.240.000		11.240.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			800.000		800.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>31.707.000</b>
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: Pajak Rokok-Penegakan Disiplin					
Lokasi	: BIRO HUKUM JAWA TENGAH					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum 12 Bulan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023			Sampai 31 Desember 2023		
Keterangan	: -					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			220.000.000		220.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			220.000.000		220.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			220.000.000		220.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			21.200.000		21.200.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			21.200.000		21.200.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			19.080.000		19.080.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			2.120.000		2.120.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			198.800.000		198.800.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			198.800.000		198.800.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			198.800.000		198.800.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>220.000.000</b>

Semarang, 17 November 2022

**KEPALA BIRO HUKUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

(IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum)

NIP. 197112071995031003

Keterangan :


Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	KABID ANGGARAN	
2	ANDREYANA SETIAWAN, SE	198305252006041009	Analisis Perencanaan Anggaran	
3	FARADINA KRISLIANITA, S.H	199309062019022009	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	
4	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	KABID PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	
5	WISNOE DJAYA WARDHANA, SE	196706171995031002	KASUBBID PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

\*) coret yang tidak perlu


	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				RKA-RINCIAN BELANJA SKPD	
	Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023					
Urusan Pemerintahan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
Sasaran Program (outcome)	: Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah					
Capaian Program (impact)	: Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
Kegiatan	: 4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum					
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01 - Sekretariat Daerah					
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.02 - BIRO HUKUM					
Alokasi Tahun T-1	: Rp915.000.000					
Alokasi Tahun T	: Rp1.290.000.000					
Alokasi Tahun T+1	:					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani				100%	
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM				96%	
Masukan	Tersedia Dana				Rp1.290.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara				12Dokumen	
	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah				12Dokumen	
Hasil	Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum				96%	
	Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum				96%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum					
Sumber Pendanaan	: Pajak Rokok-Penegakan Disiplin					
Lokasi	: BIRO HUKUM JAWA TENGAH					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara 10 Perkara Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu 200 Perkara					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023			Sampai 31 Desember 2023		
Keterangan	: -					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			965.000.000		965.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			965.000.000		965.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			965.000.000		965.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			24.724.000		24.724.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			24.724.000		24.724.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			6.244.000		6.244.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			2.775.000		2.775.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			600.000		600.000

5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman			15.105.000		15.105.000
	Rapat					
5.1.2.2	Belanja Jasa			668.000.000		668.000.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			668.000.000		668.000.000
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			93.000.000		93.000.000
5.1.2.2.1.5	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara			575.000.000		575.000.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			272.276.000		272.276.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			272.276.000		272.276.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			272.276.000		272.276.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>965.000.000</b>
Sub Kegiatan : Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						
Sumber Pendanaan : Pajak Rokok-Penegakan Disiplin						
Lokasi : BIRO HUKUM JAWA TENGAH						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Fasilitas Implementasi HAM Kabupaten/kota 35 Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 7 Sengketa						
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023						
Keterangan : -						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			325.000.000		325.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			325.000.000		325.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			325.000.000		325.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			38.548.000		38.548.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			38.548.000		38.548.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			5.998.000		5.998.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			3.600.000		3.600.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			28.950.000		28.950.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			171.500.000		171.500.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			171.500.000		171.500.000
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			171.500.000		171.500.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			114.952.000		114.952.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			114.952.000		114.952.000



5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		114.952.000	114.952.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>325.000.000</b>
<p>Semarang, 17 November 2022</p> <p><b>KEPALA BIRO HUKUM</b></p> <p><b>PROVINSI JAWA TENGAH</b></p> <p>(<u>IWANUDDIN ISKANDAR, SH. M.Hum</u>)</p> <p>NIP. 197112071995031003</p>				
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	KABID ANGGARAN	
2	ANDREYANA SETIAWAN, SE	198305252006041009	Analisis Perencanaan Anggaran	
3	FARADINA KRISLIANITA, S.H	199309062019022009	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	
4	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	KABID PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	
5	WISNOE DJAYA WARDHANA, SE	196706171995031002	KASUBBID PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

\*) coret yang tidak perlu

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				RKA-RINCIAN BELANJA SKPD	
	Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023					
Urusan Pemerintahan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
Sasaran Program (outcome)	: Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah					
Capaian Program (impact)	: Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
Kegiatan	: 4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum					
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01 - Sekretariat Daerah					
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.02 - BIRO HUKUM					
Alokasi Tahun T-1	: Rp915.000.000					
Alokasi Tahun T	: Rp1.290.000.000					
Alokasi Tahun T+1	:					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani				100%	
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM				96%	
Masukan	Tersedia Dana				Rp1.290.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara				12Dokumen	
	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah				12Dokumen	
Hasil	Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum				96%	
	Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum				96%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum					
Sumber Pendanaan	: Pajak Rokok-Penegakan Disiplin					
Lokasi	: BIRO HUKUM JAWA TENGAH					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara 10 Perkara Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu 200 Perkara					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023			Sampai 31 Desember 2023		
Keterangan	: -					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			965.000.000		965.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			965.000.000		965.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			965.000.000		965.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			24.724.000		24.724.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			24.724.000		24.724.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			6.244.000		6.244.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			2.775.000		2.775.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			600.000		600.000

5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman			15.105.000		15.105.000
	Rapat					
5.1.2.2	Belanja Jasa			668.000.000		668.000.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			668.000.000		668.000.000
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			93.000.000		93.000.000
5.1.2.2.1.5	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara			575.000.000		575.000.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			272.276.000		272.276.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			272.276.000		272.276.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			272.276.000		272.276.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>965.000.000</b>
Sub Kegiatan : Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						
Sumber Pendanaan : Pajak Rokok-Penegakan Disiplin						
Lokasi : BIRO HUKUM JAWA TENGAH						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Fasilitas Implementasi HAM Kabupaten/kota 35 Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 7 Sengketa						
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023						
Keterangan : -						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			325.000.000		325.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			325.000.000		325.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			325.000.000		325.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			38.548.000		38.548.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			38.548.000		38.548.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			5.998.000		5.998.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			3.600.000		3.600.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			28.950.000		28.950.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			171.500.000		171.500.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			171.500.000		171.500.000
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			171.500.000		171.500.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			114.952.000		114.952.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			114.952.000		114.952.000

5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			114.952.000		114.952.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>325.000.000</b>
<p>Semarang, 17 November 2022</p> <p><b>KEPALA BIRO HUKUM</b></p> <p><b>PROVINSI JAWA TENGAH</b></p> <p>(<u>IWANUDDIN ISKANDAR, SH. M.Hum</u>)</p> <p>NIP. 197112071995031003</p>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan		
1	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	KABID ANGGARAN			
2	ANDREYANA SETIAWAN, SE	198305252006041009	Analisis Perencanaan Anggaran			
3	FARADINA KRISLIANITA, S.H	199309062019022009	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA			
4	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	KABID PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA			
5	WISNOE DJAYA WARDHANA, SE	196706171995031002	KASUBBID PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			

\*) coret yang tidak perlu